

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan sektor perekonomian pedesaan dalam belakangan ini mengalami perubahan yang signifikan dalam pelaksanaannya semenjak diberlakukannya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Dengan adanya kebijakan ini membuat desa semakin bisa mengembangkan potensinya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Irawan, 2020). Pembangunan desa merupakan upaya pemerintah dalam peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Undang-Undang RI No.6, 2014). Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Undang-Undang RI No.6, 2014).

Dalam pelaksanaannya beberapa upaya pembangunan ekonomi pedesaan yang sudah dijalankan pemerintah belum semua dapat mencapai target yang maksimal. Hal ini disebabkan karena tingginya tingkat kemiskinan di desa dan masih banyak persoalan ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat desa (Wahidin et al., 2022). Di sepanjang tahun 2021, Badan Pusat Statistik mencatat adanya kenaikan indeks kemiskinan di pedesaan dari bulan Maret 2021 sebesar 0,57 menjadi 0,59 pada bulan September 2021. Badan Pusat Statistik juga menyatakan bahwa masih ada sebagian masyarakat desa yang belum menerima bantuan dari

pemerintah (Elena, 2022). Meski sudah banyak kebijakan dan program yang dijalankan pemerintah, namun kegagalan atau keberhasilan pembangunan perekonomian pedesaan sangat tergantung dari pihak pelaksana yaitu pemerintah dan masyarakat (BAPPEDA, 2016).

Banyak faktor yang menyebabkan kurangnya keberhasilan dalam program yang dijalankan pemerintah sebagai upaya dalam pembangunan ekonomi pedesaan. Salah satunya adalah adanya campur tangan pemerintah yang berlebihan yang akan menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat pedesaan untuk mengelola dan menjalankan mesin ekonomi pedesaan (Sulaksana & Nuryanti, 2019). Dalam penerapannya lembaga ekonomi desa kurang efektif dan bergantung kepada bantuan pemerintah sehingga mengurangi semangat kemandirian masyarakat desa maka dengan itu pemerintah membangun cara baru untuk mengelola perekonomian pedesaan dengan sistem kelembagaan yang mengaturnya (Adlani, 2017).

Bentuk kelembagaan tersebut adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes adalah badan usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa serta masyarakat (Peraturan Menteri Dalam Negeri No.39, 2010). Berdirinya BUMDes dilandasi oleh Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah desa. Daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian desa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum (Undang-Undang RI No.23, 2014). Berdasarkan perkembangannya, Kementrian Desa (KEMENDES) mengatakan terdapat 57.273 BUMDes yang ada di Indonesia pada tahun 2021. Dari total

tersebut terdapat 45.233 BUMDes yang aktif dan 12.040 BUMDes yang tidak aktif. Di antara yang aktif tersebut, sebanyak 15.768 BUMDes atau 35% terdampak pandemi hingga tutup usaha, sehingga merumahkan 123.176 pekerjanya (Waseso, 2021).

Dari data di atas, data tersebut mencangkup BUMDes yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Menurut data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKPPKB) Kabupaten Gunung Kidul, Terdapat 144 BUMDes yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Dari total tersebut terdapat 130 BUMDes yang aktif dan 14 BUMDes yang tidak aktif sampai akhir tahun 2020. Beberapa BUMDes di Kabupaten Gunung Kidul menjalankan perannya sebagai *social entrepreneurship* dengan menciptakan beberapa program seperti pengelolaan sampah, pengelolaan air bersih, desa wisata, dan pasar desa (DPMKPPKB, 2021). Namun terdapat banyak faktor yang menyebabkan kinerja BUMDes menurun dan tidak aktif di Kabupaten Gunung Kidul. Salah satu faktornya adalah kurang adanya perhatian khusus dari pemerintah desa yang berdampak pada BUMDes itu sendiri seperti BUMDes Maju Mandiri di Kabupaten Gunung Kidul yang mati suri akibat pandemik COVID-19 karena belum adanya langkah nyata dari pemerintah desa dalam menggerakkan ekonomi di sektor UKM di era *new normal* (Godepok, 2021)

Sedangkan kasus lain pada BUMDes Karangrejek di Kabupaten Gunung Kidul, pembentukan BUMDes ini didasari pada kondisi masalah lingkungan. Meskipun pengelola BUMDes Karangrejek sudah menerapkan orientasi kewirausahaan sosial, tetapi pada kenyataannya masih terdapat BUMDes yang

berorientasi menyimpang dari hal tersebut, dan semata-mata hanya bertujuan untuk memperoleh laba saja. BUMDes sudah melupakan semangat kewirausahaan sosial dan hanya berusaha untuk sekedar mencari keuntungan saja (Mulyono, 2019). Menurut Sukasmanto pada seminar yang diadakan oleh Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada, menjelaskan beberapa faktor kegagalan BUMDes salah satunya adalah ketika BUMDes hanya berorientasi pada keuntungan untuk pendapatan asli desa saja (Mulyono, 2019). Sedangkan faktor yang menentukan keberhasilan BUMDes adalah adanya *social entrepreneurs* di desa dan adanya *Entrepreneur Bio* yaitu entrepreneur dengan keahlian dan keterampilan manajemen yang baik (Mulyono, 2019).

Faktor penentu keberhasilan maupun kegagalan di sebuah organisasi ditinjau melalui hasil kinerjanya. Kinerja organisasi merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategi suatu organisasi (Galib & Hidayat, 2018). Kinerja organisasi merupakan suatu ukuran yang menggambarkan sampai sejauh mana suatu organisasi telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pokoknya sehingga mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh organisasi (Kusnendar, 2018). Sehingga, tercapainya tujuan organisasi tidak bisa dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut (Fitri, 2019). Kinerja merupakan indikator penting dalam menunjang keberhasilan organisasi atau lembaga BUMDes (Permana, 2020).

Didalam ajaran Islam manusia senantiasa diharapkan agar mencari rezeki dengan bekerja, dalam halnya bekerja dalam sebuah organisasi atau kelembagaan, setiap aktivitas yang dilakukan secara berkelompok harus didasari dengan kebaikan dan tim yang solid demi kesejahteraan bersama karena Allah SWT mengetahui apa yang telah dikerjakan oleh makhluknya (Mahfud, 2019). Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S At – Taubah ayat 105 :

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahnya : Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Menurut tafsir singkat dari Kementrian Agama Republik Indonesia, firman Allah SWT di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk setiap mukmin untuk bekerja baik bekerja dalam perusahaan/organisasi atau bekerja sendiri dengan pekerjaan yang mendatangkan manfaat, maka Allah SWT akan melihat hasil setiap apa yang telah dikerjakan. Sebagaimana organisasi sosial seperti BUMDes diharapkan pengelolanya mampu memberikan manfaat dari apa yang telah dikerjakan bagi masyarakat.

Orientasi kewirausahaan sosial merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja yang unggul berkelanjutan. Orientasi kewirausahaan sosial merupakan proses, praktik, dan pengambilan keputusan dalam organisasi sosial

(Mashudi et al., 2018). Dalam teori *Resources Based View (RBV)* dengan perspektif sumber daya, memandang bahwa *competitive advantage* di perusahaan dapat dibangun dengan penggunaan sumber daya yang heterogen (Masyitoh et al., 2019). Dengan orientasi kewirausahaan sosial pandangan pengelola organisasi sosial mengarah pada kemampuan organisasi untuk berinovasi, proaktif mengamati lingkungan eksternal, mengelola risiko, berorientasi efektif, melayani misi sosial, dan mempertahankan kelangsungan hidup jangka panjang dalam memanfaatkan sumber daya penting dengan perencanaan yang baik sehingga organisasi sosial akan berhasil mencapai sasaran (Haira et al., 2022). Sesuai dengan teori RBV, pengelola BUMDes yang memiliki orientasi kewirausahaan sosial dapat menciptakan *competitive advantage* dari *resource* yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi dengan kinerjanya.

Beberapa peneliti telah meneliti pengaruh orientasi kewirausahaan sosial terhadap kinerja pada berbagai organisasi sosial. Tetapi terdapat ketidakkonsistenan hasil pada penelitian sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pinheiro et al (2021), Mashudi et al (2018), Adro et al (2021), dan Darmanto & Bukirom (2021) menunjukkan bahwa orientasi kewirausahaan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi sosial/BUMDes. Sedangkan penelitian oleh Hong & Cho (2012), Chen & Hsu (2013), dan Khan & Bashir (2020) menunjukkan bahwa orientasi kewirausahaan sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja kewirausahaan sosial.

Modal sosial memegang peranan penting dalam menunjang kinerja sebuah perusahaan sebab telah mencakup sumber daya yang diperlukan untuk mencapai

tujuan. Modal sosial merupakan elemen penting berupa jaringan, norma, dan kepercayaan yang jika dibangun dan dikelola dengan baik akan menjadi peluang untuk meningkatkan kinerja (Yohanes et al., 2017). Dalam teori RBV, modal sosial digambarkan sebagai jejaring nilai atau norma informal yang dimiliki antar anggota dengan anggota lain di suatu kelompok yang dapat memungkinkan adanya jalinan kerja sama di antara mereka (Fukuyama, 2002). Berdasarkan teori tersebut, pentingnya peran modal sosial yang dikelola dalam sebuah perusahaan sosial dapat menunjang keefektifan kinerja perusahaan sosial seperti BUMDes dalam mencapai tujuannya.

Beberapa peneliti telah meneliti pengaruh modal sosial terhadap kinerja pada berbagai organisasi sosial. Tetapi terdapat ketidakkonsistenan hasil pada penelitian sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Khan et al (2021), Yudha (2019), Yohanes et al (2017), dan Agyapong et al (2017) menunjukkan bahwa modal sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan sosial/BUMDes. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Walenta (2019) temuannya adalah modal sosial tidak berpengaruh terhadap kinerja UMKM.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan ketidakkonsistenan hasil diduga ada faktor atau kondisi lain yang mempengaruhi hubungan antara modal sosial dan orientasi kewirausahaan sosial terhadap kinerja BUMDes, faktor lain tersebut adalah inovasi sosial. Hasil rekomendasi penelitian sebelumnya juga menyebutkan penting untuk memasukkan variabel moderator atau mediasi lainnya untuk menentukan jalur yang lebih baik untuk meningkatkan

kinerja perusahaan sosial (Pinheiro et al., 2021). Penelitian ini mengkaji tentang orientasi kewirausahaan sosial, modal sosial dan kinerja BUMDes yang kemudian modal sosial dan kinerja BUMDes dimoderasi oleh inovasi sosial.

Inovasi sosial dapat dijadikan sebagai solusi dalam penyelesaian masalah sosial dan sebagai faktor penunjang pembangunan dalam sektor perekonomian. Inovasi sosial adalah gagasan atau ide baru yang dilakukan untuk mengatasi masalah sosial masyarakat, melibatkan perubahan hubungan kelembagaan (kolaborasi), meningkatkan kapasitas juga kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan peluang jangka panjang atau keberlanjutan (Sunggel, 2018). Inovasi sosial adalah prosedur yang mengembangkan dan menyebarkan solusi yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan masalah lingkungan dan sosial yang sulit, menantang dan umum dalam pemeliharaan pembangunan sosial (Broekema et al., 2021). Inovasi sosial digambarkan sebagai pengenalan produk, model, dan layanan baru yang memenuhi kebutuhan sosial dan perusahaan serta mengembangkan kolaborasi dan asosiasi sosial baru (Oeij et al., 2019). Mengambil kesadaran akan pentingnya inovasi sosial berkaitan dengan efektivitas usaha sosial (Pasricha & Rao, 2018).

Menurut Khan et al (2021) dalam penelitiannya yang mengungkap bahwa peran moderasi inovasi sosial pada hubungan modal sosial dan kinerja berkelanjutan perusahaan sosial dapat mempengaruhi sedemikian rupa hubungan modal sosial terhadap kinerja berkelanjutan yang akan lebih tinggi ketika inovasi sosial tinggi. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, adanya inovasi sosial untuk memastikan kinerja berkelanjutan dari perusahaan sosial yang lebih agresif

dianggap sebagai komponen dasar bagi pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Dengan demikian, inovasi sosial diduga dapat berperan memoderasi hubungan antara modal sosial terhadap kinerja perusahaan sosial/BUMDes.

Signifikansi penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan teori *Resource Based View (RBV)*, khususnya bagi lembaga usaha desa yang dinaungi oleh pemerintah desa untuk memperkuat perekonomian desa. Penelitian ini mereplikasi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Khan et al (2021) dengan mengganti variabel *social value creation* menjadi orientasi kewirausahaan sosial sebagai variabel independen dan mengganti variabel *sustainable performance* menjadi kinerja BUMDes sebagai variabel dependen. Penggunaan variabel orientasi kewirausahaan sosial didasari oleh fenomena di Kabupaten Gunung Kidul yang terdapat BUMDes hanya berorientasi pada keuntungan saja dan penggunaan kinerja BUMDes menjadi variabel dependen agar lebih spesifik kepada objek penelitian. Penelitian Khan et al (2021) dilakukan di kota Islamabad dan Rawalpindi, dengan sampel 57 perusahaan sosial di Pakistan. Sedangkan penelitian ini dilakukan di Indonesia dengan sampel Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang terletak di Kabupaten Gunung Kidul.

Penelitian ini masih relevan untuk dikaji karena berkaitan dengan kinerja BUMDes Kabupaten Gunung Kidul di era *new normal* selepas beberapa kinerja BUMDes mengalami penurunan semenjak pandemik COVID-19 dan masih sedikitnya penelitian yang mengkaji tentang kinerja BUMDes dengan orientasi kewirausahaan sosial dan modal sosial. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dan adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti

tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Orientasi Kewirausahaan Sosial dan Modal Sosial Terhadap Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dengan Inovasi Sosial Sebagai Moderasi” Studi kasus pada BUMDes Kabupaten Gunung Kidul.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena dan gap penelitian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah orientasi kewirausahaan sosial berpengaruh positif terhadap kinerja BUMDes di Kabupaten Gunung Kidul?
2. Apakah modal sosial berpengaruh positif terhadap kinerja BUMDes di Kabupaten Gunung Kidul?
3. Apakah inovasi sosial memoderasi pengaruh modal sosial terhadap kinerja BUMDes di Kabupaten Gunung Kidul?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai :

1. Pengaruh positif antara hubungan orientasi kewirausahaan sosial terhadap kinerja BUMDes
2. Pengaruh positif antara hubungan modal sosial terhadap kinerja BUMDes
3. Pengaruh moderasi inovasi sosial dalam hubungan modal sosial terhadap kinerja BUMDes.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan beberapa manfaat yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu berpartisipasi dalam mengkonfirmasi teori *Resource Based View (RBV)* dalam memprediksi kinerja BUMDes. Penelitian ini juga menambah bukti empiris mengenai determinan tentang kinerja BUMDes yang kemudian bisa digunakan sebagai referensi penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharap mampu memberi masukan bagi pengelola BUMDes agar segera bisa menciptakan *competitive advantage* dari *resource* yang dimilikinya melalui penerapan perilaku orientasi kewirausahaan sosial, mengelola modal sosial yang ada di masyarakat, dan mengembangkan inovasi sosial yang ada untuk meningkatkan keefektifan kinerja BUMDes.
- b. Penelitian ini diharap mampu memberi masukan bagi pemerintah desa untuk pengambilan keputusan dan evaluasi terhadap Kinerja BUMDes yang dijadikan sebagai penggerak roda perekonomian desa.
- c. Penelitian ini diharap mampu menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan referensi di perpustakaan perguruan tinggi.
- d. Penelitian ini diharap mampu memberi informasi kepada masyarakat tentang kondisi Kinerja BUMDes di desanya